

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Abad 19 dalam sejarah merupakan abad terjadinya penetrasi birokrasi dan kekuasaan kolonialisme Belanda yang di barengi dengan Kapitalisme di beberapa wilayah Hindia Belanda. Setelah *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) 31 Desember 1799, peran VOC diambil alih Pemerintah Hindia Belanda. Kerajaan Belanda menempatkan Gubernur Jendral di Batavia sebagai perpanjangan tangannya. Melalui Jenderal intensifikasi perdagangan dan mengeksploitasi di giatkan demi mengisi kas Kerajaan Belanda yang deficit, termasuk pengiriman ekspedisi militer dan sipil keluar pulau Jawa. Pada pertengahan abad 19, sejumlah pengusaha Belanda dan Eropa lainnya telah membuka perkebunan tembakau yang besar di daerah Sumatera Timur, tepatnya di Tanah Deli.

Melalui perkebunan, masyarakat Sumatera Timur (Deli) di perkenalkan dengan nilai-nilai Kapitalisme Modern dan terjadilah Interaksi antara masyarakat yang daerahnya di pergunakan sebagai areal tanaman tembakau dengan berbagai kehidupan perkebunan yang didiami oleh bangsa Eropa. Interaksi ini sebenarnya berlangsung dalam suasana yang tidak seimbang, yakni antara dua system sosial yang sama sekali berbeda. Interaksi ini pada gilirannya menimbulkan benturan antara masyarakat Sumatera Timur (Deli) dengan para pendang/pengusaha perkebunan orang-orang Eropa, khususnya Belanda. benturan itu sering terjadi karena pihak perkebunan membutuhkan banyak tanah-tanah konsesi yang secara

tradisional adalah milik para Datuk/ raja Urung mereka. Keberhasilan perusahaan perkebunan mencari tanah karena adanya dukungan politik dari Sultan Deli dan Pemerintah Kolonial Belanda.

Pemerintah Belanda dan Sultan Deli memiliki kepentingan tersendiri. Pemerintah Belanda berusaha menciptakan kawasan Sumatera Timur/ Deli menjadi daerah penghasil Komoditi perdagangan untuk pasar perdagangan Eropa. Tujuan ini sesuai dengan politik terbuka (opendoor Politiek) yang dijalankan Pemerintah Belanda mulai 1870. Opendoor Politiek di jalankan dengan maksud mencari investor asing agar mau menanamkan modalnya dalam industri perkebunan di Indonesia. Untuk mencari ambisi besar itu ada dua kebijakan penting yang diambil pemerintah colonial yakni pertama , menerapkan Undang-Undang Agraria 1870 perangkat Hukum untuk memperoleh akses konsesi dan menjaga “rust en orde” (stabilitas keamanan dan ketertiban) di wilayah Hindia Belanda, termasuk Deli.

Sultan Deli juga memiliki kepentingan ekonomi dan politik atas upaya-upaya pembangunan perkebunan di Sumatera Timur. Secara ekonomi besarnya uang sewa yang di dapatkan sangat menaikkan gengsi dan martabatnya dan sekaligus secara yuridis sampai politis wilayah kekuasaannya di akui pemerintah Belanda. Sebuah badan usaha yang belum masuknya Belanda sudah diakui oleh Sultan Deli baik secara damai (kawin politik) maupun secara kekerasan (perang 1822) untuk menguasai wilayah Sunggal. Sebaliknya adanya scenario besar dari dua kekuasaan itu menimbulkan malapetaka bagi rakyat Sunggal. Datuk Sunggal tidak dilibatkan dalam urusan sewa tanah dan inilah yang menimbulkan konflik

terbuka dengan pemerintah Belanda. Konflik ini sesungguhnya juga merupakan akses terjadinya kontak langsung antara masyarakat dengan tatanan tradisional dengan system ekonomi modern/ kapitalisme.

Konflik terbuka antara rakyat Sunggal di bawah Datuk Badiuzzaman dengan Belanda dikenal dengan Perang Sunggal terjadi 15 mei 1872, tepat dua tahun setelah undang-undang agraria diterapkan di Hindia Belanda. Ini membuktikan bahwa konflik itu (latar belakang perjuangan Datuk Badiuzzaman) erat sekali kaitannya dengan masalah tanah.

Perang sunggal yang biasa disebut *Batak Oorlog* (perang Batak) yang terjadi tahun 1872-1895, merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Sumatera Utara. Datuk Badiuzzaman Surbakti memiliki peranan penting dalam perlawanan rakyat Sunggal terhadap Belanda dan Kesultanan Deli.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang “*Datuk Badiuzzaman Surbakti*” ini peneliti mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah tulisan dalam bentuk tentang:

Peranan Datuk Badiuzzaman Surbakti Dalam Perang Sunggal pada tahun 1872-1895

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Perluasan Wilayah Perkebunan yang dilakukan Kolonialisme Belanda.

2. Konflik Pertanahan di Sunggal.
3. Peranan Datuk Badiuzzaman Surbakti dalam perang Sunggal.

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk lebih memaksimalkan hasil penelitian ini, maka penulis membatasi masalah penelitian yaitu: Peranan Datuk Badiuzzaman Surbakti dalam Perang Sunggal tahun 1872-1895.

### **D. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perluasan wilayah perkebunan yang dilakukan Kolonialisme Belanda.
2. Bagaimana konflik pertanahan di Sunggal.
3. Peranan Datuk Badiuzzaman Surbakti dalam perang Sunggal.

### **E. Tujuan Penelitian**

Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan tertentu. Dengan berpedoman kepada tujuannya, maka akan lebih mudah mencapai sasaran yang diharapkan. Dengan demikian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perluasan wilayah perkebunan yang dilakukan Kolonialisme Belanda.
2. Untuk mengetahui konflik pertanahan di Sunggal.

3. Untuk mengetahui peranan Datuk Badiuzzaman Surbakti dalam perang Sunggal.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh setelah melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti dan pembaca mengenai Peranan Datuk Badiuzzaman Surbakti dalam Perang Sunggal Pada tahun 1872 – 1896.
2. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian dalam masalah yang sama.
3. Menambah pembendaharaan karya ilmiah bagi lembaga pendidikan, khususnya Universitas Negeri Medan.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY